

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

Sekretariat Daerah



**Alamat : Jl. Prof. Dr. Soediatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur,
Kalimantan Timur 75683 Telepon (0549) 25050, Laman :
[http.www.kutaitimurkab.go.id](http://www.kutaitimurkab.go.id), Pos-el :
humaspemkabkutim@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sekretariat Daerah mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator- indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sangatta, 1 Januari 2026
Sekretariat Daerah



Rizali Hadi

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kabag Perencanaan dan Keuangan	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Sekretariat Daerah mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator- indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sangatta, 01 Januari 2026
Sekretariat Daerah



Rizali Hadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	7
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	9
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025	12
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah	14
BAB III	39
AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Capaian Kinerja	39
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	40
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan..	40

3.1.3	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	43
3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	45
3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	48
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	53
3.2	Realisasi Anggaran	57
BAB IV		65
PENUTUP		65
LAMPIRAN		66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 ...	5
<u>Tabel 2.1</u>	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	
	Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis.....	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2025	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah	18
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	
	Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	40
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	35
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	39
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	43
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar	
	Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	47
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	50
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan	54
	dan Sasaran	
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan	
	Kegiatan	54
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Sekretariat Daerah :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

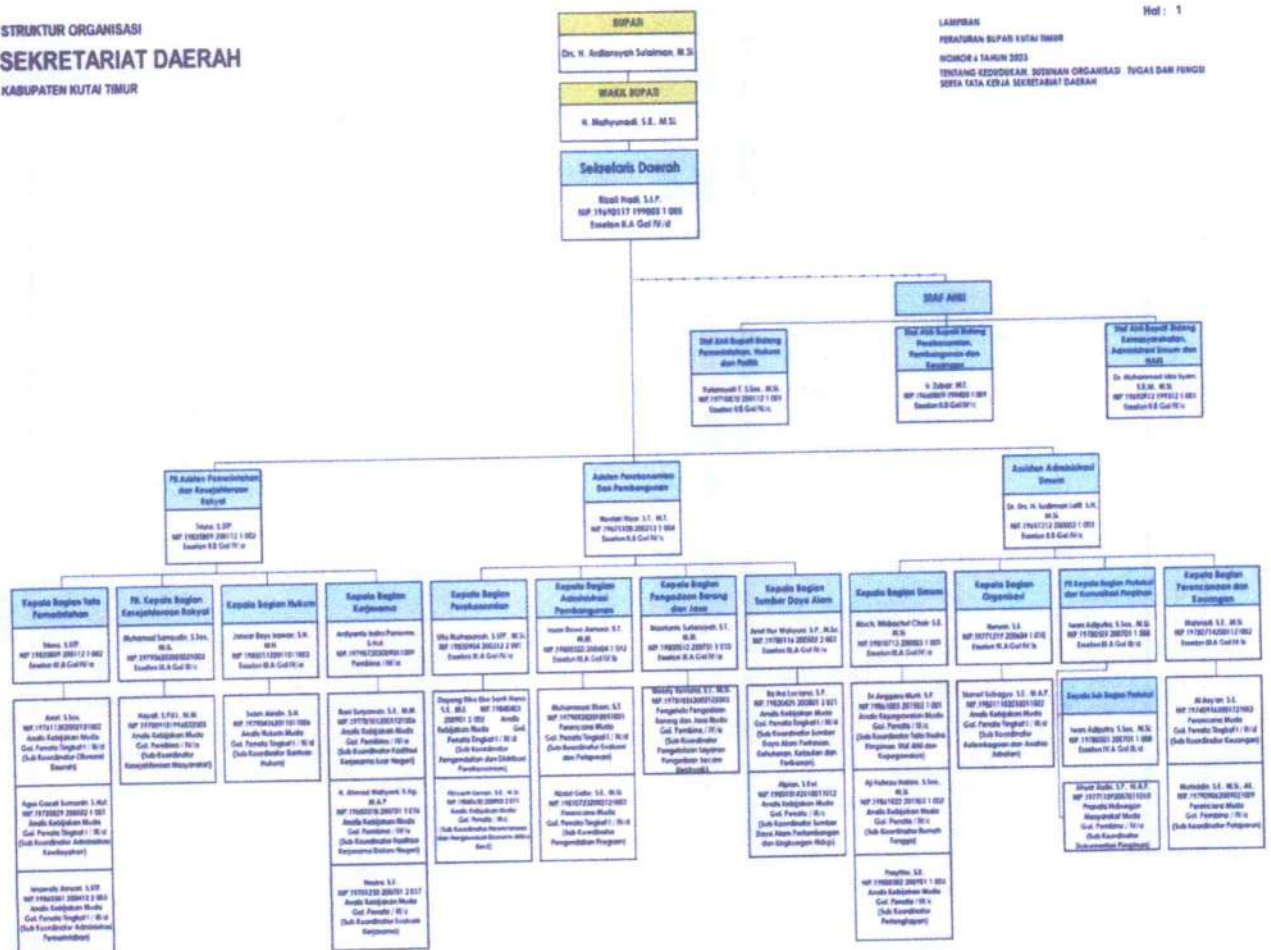
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam Menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah,
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum,
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta prasarana dan sarana Pemerintah Daerah,
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, dan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD Murni	Tahun 2024	Rp. 559.437.490.184
APBD Perubahan	Tahun 2024	Rp. 946.921.728.640
APBD Murni	Tahun 2025	Rp. 742.292.088.445
APBD Perubahan	Tahun 2025	Rp. 597.149.212.391

Sumber : DPA Murni dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2024; DPA Murni dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor. 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
7. Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Sekretariat Daerah adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah yang optimal	1. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama Daerah	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Pemuka agama yang menerima insentif Penyelenggaraan festival keagamaan	Prediksi status tinggi 595 Orang 1 Festival	Prediksi status tinggi 595 Orang 1 Festival	Prediksi status tinggi 595 Orang 1 Festival	Prediksi status tinggi 595 Orang 1 Festival	Prediksi status tinggi 595 Orang 1 Festival

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah Periode 2021 – 2025

		Rata- rata lama sekolah	12,89 Tahun	12,89 Tahun	12,89 Tahun	12,89 Tahun	12,89 Tahun
		Angka Harapan Lama sekolah	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
		Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Meningkatkan optimalisasi implementasi	Persentase pemenuhan penunjang urusan	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

		regulasi bidang administrasi umum	pemerintahan daerah kabupaten				
2	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel	Terpenuhnya tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	75,87	75,90	75,93	75,95
							75,98

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			SUMBER DATA
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN		
1	2	3	4	5	6		7
1. Terwujudnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim							
1. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama		Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Prediksi status tinggi	- Sesuai dengan TUPOKSI Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama	- Berdasarkan Dokumen perencanaan dan Dokumen laporan		- Berdasarkan hasil MONEV ke lapangan - Sesuai dengan RKA - DPA Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama
		Pemuka agama yang menerima insentif	Orang				
		Penyelenggaraan festival keagamaan	Festival				
		Rata- rata lama sekolah	Persen				
		Angka Harapan Lama sekolah	Persen				

	2. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi Pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam	Persen	- Sesuai dengan TUPOKSI Bagian perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam	- Disesuaikan dengan Jumlah Anggaran yang Tersedia	- Hasil koordinasi dan konsultasi Bag. Perekonomian, Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Pengadaan Barang dan Jasa dan Bag. Sumberdaya Alam
	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
	3. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang administrasi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persen	- Sesuai dengan TUPOKSI Bagian keuangan, Administrasi Umum, Tata Laksana Organisasi dan Protokol	- Hasil Laporan Masing- masing Bagian	- Berdasarkan RKA - DPA yang disusun - Tupoksi masing- masing bagian
2. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel						
	Terpenuhinya tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen	- Sesuai dengan TUPOKSI Bagian keuangan, Administrasi Umum, Tata Laksana Organisasi dan Protokol	- Hasil Laporan Masing- masing Bagian	- Berdasarkan RKA - DPA yang disusun - Tupoksi masing- masing bagian

Sumber: Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim	1. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Pemuka agama yang menerima insentif Penyelenggaraan festival keagamaan Rata- rata lama sekolah Angka Harapan Lama sekolah Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, kerjasama	Prediksi status tinggi Orang Festival Persen Persen Persen	Prediksi status tinggi 595 Orang 1 Festival 12,89 Tahun 9,20 100
		2. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang	Persentase implementasi kebijakan daerah di	Persen	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
		perekonomian dan pembangunan	bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam		
		3. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang administrasi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten	Persen	100
2	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel	Terpenuhinya tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	Persen	75,95

Sumber: Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Sekretariat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Optimalnya implementasi kebijakan pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama Daerah	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama Daerah	100%
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat Status Tinggi
		Pemuka Agama yang Menerima Insentif	1280 Orang
		Peringatan Hari Besar Islam	1 Festival
		Jumlah Siswa SLTA dan Mahasiswa S1 dan S2 yang mendapatkan Beasiswa Kutai Timur	2500 Siswa SLTA, 700 Mahasiswa S1 dan 86 Mahasiswa S2
2	Optimalnya Implementasi Kebijakan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pembangunan, Barang Jasa dan Sumber Daya Alam	Presentasi Implementasi Kebijakan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pembangunan Barang Jasa dan Sumber Daya Alam	100 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Optimalisasi Implimentasi Kebijakan Pemerintahan Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Prokompi dan Bidang Organisasi	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indeks Kepuasan Masyarakat	100% 81,41

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksanannya program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya Program Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemuka Agama yang menerima Insentif	Predikat Status Tinggi	
				595	Orang

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Penyelenggaraan Festival Keagamaan	1	Kegiatan
			Persentase Implementasi Kebijakan Daerah di Bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama	100	%
			Jumlah Dokumen Administrasi administrasi Tata Pemerintahan	13	Dokumen
Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen dibidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Tersedianya Dokumen kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan	Jumlah Dokumen	4	Dokumen
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Terpenuhnya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terpenuhnya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Terkoordinirnya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	15	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya Dokumen hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersedianya Dokumen hasil Fasilitasi dan koordinasi Hukum	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi Hukum	1450	Dokumen
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terkoordinirnya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	700	Dokumen
Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksanannya Fasilitasi Bantuan Hukum	Terkoordinirnya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	50	Kasus
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksanannya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	700	Dokumen
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, Luar Negeri dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Dokumen dan Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah	13	Dokumen
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksanannya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	Laporan
				9	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksanannya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terpenuhinya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4	Dokumen
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksanannya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terpenuhinya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100	Laporan

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terimplementasikannya kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	Terpenuhinya Implementasi Program Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.	100	%
	Tersusunnya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen Kebijakan di bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	6 12	Dokumen laporan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terpenuhinya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dokumen

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terpenuhinya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Laporan
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terpenuhinya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dokumen
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersusunnya Dokumen laporan hasil pelaksanaan AdministrasiPembangunan	Tersedianya Dokumen laporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	26	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terpenuhinya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2	Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terpenuhinya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	Laporan

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terpenuhinya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen bidang pengelolaan Barang daan Jasa	Tersedianya Dokumen pengelolaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen dan Orang Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	9.000 54	Dokumen Orang
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Tersedianya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan	4.500	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Secara Elektronik		
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.500	Dokumen
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terpenuhinya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	54	Orang
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersusunnya Dokumen hasil Pemantauan bidang Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	12	Kebijakan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Terpenuhinya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Terpenuhinya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4	Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Terpenuhinya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4	Dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Terlaksananya Layanan Penunjang Urusan	Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang	100	%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim	Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim	Urusan Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim		
			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekda Kab. Kutim	76	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur	Tersedianya Dokument bidang perencanaan dan Penganggaran Setkab Kutai Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 8	Dokumen Laporan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhi Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Bidang Administrasi Keuangan dilingkungan Setkab Kutai Timur	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen, Orang dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,012 246 8	Dokumen Orang/ Bulan Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jmlh Org yg Menerima Gaji & Tunjangan ASN	246	Orang/ Bulan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,500	Dokumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,500	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Lap Keu Bulanan/ Triwulanan/Semt SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terpenuhinya Lap Keu Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lap Keu Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jmlh Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Smtran SKPD& Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keu Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8	Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi Rencana	Tersedianya dokumen Rencana Kebutuhan Barang	Jumlah Dokumen	1 2	Dokumen Laporan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
	Kebutuhan Barang Setkab Kutai Timur		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian Setkab Kutai Timur	Tersedianya dokumen kepegawaian Setkab Kutai Timur	Jumlah Orang, Unit, Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30 12 3	Orang Unit Paket

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tepenuhinya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Unit
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan bidang Administrasi Perkantoran dilingkungan Setkab Kutai Timur	Tersedianya Dokumen Laporan bidang Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	155 24 5000	Paket Laporan Dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Paket

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terpenuhi Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhi Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Paket pengadaan Barang penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhnya kebutuhan Paket Pengadaan Barang Setkab Kutai Timur	Terperuhnya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional	82	Unit
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terperuhnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	28	Unit
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Terperuhnya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29	Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terperuhnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan bidang penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya laporan bidang Jasa	Jumlah Laporan di Bidang Jasa	48	Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya bidang pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan Setkab Kutai Timur	Terpenuhinya pemeliharaan Barang dilingkungan Setkab Kutai Timur	Jumlah unit Barang yang dipelihara	186	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yg Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15	Unit

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15	Unit
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25	Unit
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhi kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan operasional Pejabat Negara	2 5	Orang/ bulan Paket
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhi Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/ bulan

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5	Paket
Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Paket kebutuhan kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Paket kebutuhan kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan Sekretariat Daerah	48	Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	30	Paket

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
			Daerah yang Disediakan		
Penataan Organisasi	Tersusunnya Dokumen dan Laporan yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah Pemda Kutai	Tersedianya Dokumen dan Laporan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bidang Penataan Organisasi	8 2	Dokumen Laporan
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terpenuhiya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaa Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	Dokumen
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terpenuhiya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terpenuhiya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terpenuhiya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan	4	Dokumen

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	
				Angka	Satuan
1	2	3	4	5	6
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Publik dan Tata Laksana		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersusunnya Laporan hasil Pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan	Tersedianya Laporan Protokol dan komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dokumen
Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Terpenuhinya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan	36	Laporan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terpenuhinya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim						
	1. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3 Predikat	-	-	-	
		Pemuka agama yang menerima insentif	595 Orang	4.183 Orang	703.03%	Sangat tinggi	PK Bag. Kesra
		Penyelenggaraan festival keagamaan	1 Kegiatan	100%	100%	Sangat tinggi	-
		Rata- rata lama sekolah	9,20 Tahun	9,55 Tahun	103,8 %	Sangat tinggi	
		Angka Harapan Lama sekolah	12,89 Tahun	13,20 Tahun	102,4 %	Sangat tinggi	
	2. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100 %	100 %	100 %	Sangat tinggi	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang administrasi umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
2	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel						
	1. Terpenuhinya tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	75,87%	9,95%	85,82%	Tinggi	Bag. Organisasi

Sumber : Evaluasi Renja Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Uraian penjelasan table 3.2:

- 1 Pada Indikator Kinerja Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 hingga saat disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini hasilnya belum terbit:
- 2 Pada Indikator Kinerja Pemuka agama yang menerima insentif pada tahun 2025 prosentase capaian meningkat hingga 703.03% disebabkan penambahan jumlah penerima sebanyak 4.183 Orang yaitu Imam Masjid, Dai Pembangunan, Marbot/ Doja, Pendeta, Rohaniawan;

- 3 Pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara umum mencerminkan Tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM rata- rata yaitu 85,82%, nilai IKM di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	6	5	6	7
1	Terwujudnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim						
1	Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	2,9131 Predikat	-	3 Predikat	-	-
		Pemuka agama yang menerima insentif	678 Orang	1.130 Orang	595 Orang	4.183 Orang	703.03%
		Penyelenggaraan festival keagamaan	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Rata- rata lama sekolah	9,45 Tahun	9,47 Tahun	9,20 Tahun	9,55 Tahun	103,8 %

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	6	5	6	7
		Angka Harapan Lama sekolah	13,1 Tahun	13,02 Tahun	12,89 Tahun	13,20 Tahun	102,4 %
2.	Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang administrasi umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel						
1	Terpenuhinya tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	81,3%	81,41%	75,98%	85,82%	112,95%

Sumber: Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, 2024 dan 202

Uraian penjelasan table 3.3:

- 1 Pada Indikator Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk penilaian berlaku sistem n-1, untuk Tahun 2024 masih dalam tahap penilaian, untuk tahun 2023 adalah hasil penyusunan LPPD tahun 2022, dengan capaian nilai 2,9131 Predikat;
- 2 Pada Indikator Kinerja Pemuka agama yang menerima insentif pada tahun 2025 prosentase capaian meningkat hingga 703.03% disebabkan penambahan jumlah penerima sebanyak 4.183 Orang yaitu Imam Masjid, Dai Pembangunan, Marbot/ Doja, Pendeta, Rohaniawan. Pada tahun 2024 penerima insentif berjumlah 1.130 orang, terdiri dari Dai Pembangunan, Marbot/ doja dan Rohaniawan.
- 3 Pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 semakin meningkat dengan diiringi inovasi pelayanan public melalui terobosan- terobosan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan Masyarakat meningkat.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah periode 2021-2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Terwujudnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim				
	1. Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	-	3 Predikat	-
		Pemuka agama yang menerima insentif	4.183 Orang	595 Orang	703.03%
		Penyelenggaraan festival keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Rata- rata lama sekolah	9,55 Tahun	9,20 Tahun	103,8 %
		Angka Harapan Lama sekolah	13,20 Tahun	12,89 Tahun	102,4 %
	2. Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100 %	100 %	100%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	3. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang administrasi umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	100%	100%
2	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel				
	1. Terpenuhnya tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	85,82%	75,87%	93,19%

Sumber : Renstra tahun 2021 - 2025 dan Evaluasi Renja Tahun 2025

Uraian penjelasan tabel 3.4:

1. Pada Indikator Pemuka agama yang menerima insentif realisasi pada tahun 2025 telah melampaui dari target Renstra sebanyak 703.03% dikarenakan penambahan jumlah penerima insentif dan didukung dengan penambahan anggaran perubahan tahun 2025;
2. Pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target, dan mengalami tingkat kemajuan 93,19%, untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan Masyarakat meningkat akan terus dilakukan terobosan- terobosan inovasi setiap tahunnya, dan diperlukan dukungan dari pihak- pihak terkait.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya efektivitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim						
1. Meningkatkan optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Pemuka agama yang menerima insentif	3 Predikat	-	-	-	-
		Penyelenggaraan festival keagamaan	595 Orang	4.183 Orang	703.03%	Tercapai	-
		Rata-rata lama sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	Tercapai	-
		Angka Harapan Lama sekolah	9,20 Tahun	9,55 Tahun	103,8 %	Tercapai	-
			12,89 Tahun	13,20 Tahun	102,4 %	Tercapai	-

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100 %	100 %	100 %	Tinggi	-
	3. Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang administrasi umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100%	100%	100%	Tinggi	-
2	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel						
	1. Terpenuhi tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	75,87%	85,82%	93,19%	Tinggi	-

Sumber : Dokumen Renja 2025 dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025

Uraian penjelasan table 3.5:

- Indikator kinerja pada tahun 2025 dinyatakan berhasil dengan realisasi dan prosentase capaian melebihi dari yang ditargetkan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator				Anggaran			Efisien si
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim								
1	Meningkat nya optimalisa si implement asi regulasi	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Pemuka agama yang menerima insentif	3 Predikat	-	-	207.796.917.735	200.049.700.899	96.27%	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator				Anggaran			Efisien si
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	bidang pemerinta han, kesra, hukum dan kerjasama	Penyelenggaraan festival keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%				
		Rata- rata lama sekolah	9,20 Tahun	9,55 Tahun	103,8 %				
		Angka Harapan Lama sekolah	12,89 Tahun	13,20 Tahun	102,4 %				
2.	Meningkat nya optimalisa si implement asi regulasi bidang perekonom ian dan pembangu nan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100 %	100 %	100 %	12.144.200.000	11.327.125.018	96,27%	Efisien
3.	Meningkat nya	Persentase pemenuhan	100%	100%	100%	377,208,094,656	357,130,175,393	94.68%	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator					Anggaran			Efisien si
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	optimalisa si implement asi regulasi bidang administra si umum	penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten								
2.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel									
1.	Terpenuhi nya tata kelola Administra si Perkantora n dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	75,87%	85,82%	93,19%					

Sumber : Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan (Bappeda) Tahun 2025

Uraian penjelasan table 3.6:

1. Pada table Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran, prosentase capaian pada indikator dan prosentase capaian pada anggaran untuk masing- masing tujuan/ sasaran menghasilkan prosentase capain pada tahun 2025 sangat efisien.
2. Pagu anggaran pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menyatu dengan indikator pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sebesar Rp. 377,208,094,656,00 dengan Realisasi Rp. 357,130,175,393,00 dan Capaian 94.68%

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kutim							
1.	Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang pemerintahan, kesra, hukum dan kerjasama	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Pemuka agama yang menerima insentif	- 703.03	PROGRAM PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan				
					Jumlah Dokumen yang Dihasilkan	130	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyelenggaraan festival keagamaan	100	Pelaksanaan Kebijakan Kescjahteraan Rakyat	Cakupan masyarakat yang ada di Kutai Timur	100	Menunjang	
		Rata- rata lama sekolah	103,8	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jenis Produk Hukum daerah yg diterbitkan	100	Menunjang	
		Angka Harapan Lama sekolah	102,4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang menjalin kerjasama	100	Menunjang	
2	Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam.	100	Menunjang	
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan wilayah yg berkaitan dgn pengembangan ekonomi Daerah	100	Menunjang	
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Evaluasi pembangunan daerah yang diterbitkan	100	Menunjang	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	167.07	Menunjang	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya optimalisasi implementasi regulasi bidang administrasi umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim	100	Menunjang	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Organisasi yang difasilitasi	100	Menunjang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bagian yang dilayani	100	Menunjang	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Menunjang	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang ada Di lingkungan Setkab Kutai Timur	-	Menunjang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bagian yang dilayani	100	Menunjang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang dibutuhkan	100	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa yg disediakan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang yang dipelihara	100	Menunjang	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pejabat Daerah yang difasilitasi	100	Menunjang	
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan kerumahtanggaan Pejabat negara	100	Menunjang	
				Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang tersusun	100	Menunjang	
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pejabat Daerah yang difasilitasi	100	Menunjang	
2.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel							
1.	Terpenuhinya tata kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Indeks kepuasan Masyarakat	93,19%					

Sumber : Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan (Bappeda) Tahun 2025

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Keuangan (Rp)	% Capaian
	1	2	3	
Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur		597,149,212,391	568,507,001,310	95.20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		377,208,094,656	357,130,175,393	94.68
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,367,500,000	1,113,055,594	81.39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		615,000,000	497,617,852	80.91
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		270.000.000	220.806.937	81.87
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		50.000.000	42.358.490	84.72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		432.500.000	352.272.315	81.45
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		91.155.184.226	76.842.572.719	84.30
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		88.520.184.226	74.796.823.957	84.50
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		270.000.000	266.160.000	98.58
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		932.500.000	601.846.000	64.54
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		932.500.000	725.861.496	77.84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		500.000.000	451.881.266	90.38

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Capaian
1	2	3	4
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.380.000	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	31.418.000	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.417.000	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.545.000	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.767.950	-	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.800.000	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.967.950	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.603.575.703	26.400.209.827	99.24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.058.608.460	2.051.693.049	99.66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.152.649.541	6.098.041.369	99.11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.548.160.947	10.456.003.366	99.13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	845.655.945	837.692.000	99.06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	711.033.000	707.140.443	99.45
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.870.925.623	98.889.468.092	98.04

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Capaian
1	2	3	4
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.590.768.904	12.917.716.999	95.05
Pengadaan Mebel	11.323.912.032	11.248.781.087	99.34
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.846.506.213	35.666.487.269	99.50
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.109.738.474	39.056.482.737	97.37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.181.579.633	8.272.423.749	90.10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	207.270.000	108.000.000	52.11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.543.989.721	1.416.623.006	91.75
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.411.908.300	1.090.647.900	77.25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.018.411.612	5.657.152.843	94.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.500.411.961	80.855.721.660	99.21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.987.066.140	1.898.631.931	95.55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.899.530.700	1.898.951.026	99.97
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.752.511.695	1.750.551.326	99.89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.436.809.697	13.305.909.502	99.03

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		% Capaian
		2	3	
1				4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,206,361,489		31,093,574,751	99.64
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,218,132,240		30,908,103,124	99.01
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,539,322,720		1,109,841,200	72.10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	999,200,000		813,053,800	81.37
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	540,122,720		296,787,400	54.95
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	51,770,946,840		50,725,405,129	97.98
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3,218,836,000		3,204,524,000	99.56
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2,335,481,400		2,226,635,600	95.34
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	46,216,629,440		45,294,245,529	98.00
Penataan Organisasi	2,000,000,000		1,806,252,140	90.31
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	732,286,000		713,105,662	97.38
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	56,381,000		34,465,200	61.13
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	235,724,000		216,879,233	92.01
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	643,674,000		587,029,129	91.20

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	% Capaian
1	2	3	4
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	331,935,000	254,772,916	76.75
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	11,132,500,000	11,115,225,283	99.84
Fasilitasi Keprotokolan	2,500,000,000	2,499,753,556	99.99
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	7,132,500,000	7,120,824,924	99.84
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1,500,000,000	1,494,646,803	99.64
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	207,796,917,735	200,049,700,899	96.27
Administrasi Tata Pemerintahan	15.000.000.000	14.632.618.981	97.55
Penataan Administrasi Pemerintahan	6.700.000.000	6.515.817.527	97.25
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6.700.000.000	6.577.757.221	98.18
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.600.000.000	1.539.044.233	96.19
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	176.995.826.500	169.759.572.163	95.91
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20.005.025.600	19.308.851.540	96.52
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	64.467.064.800	60.221.677.490	93.41
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	92.523.736.100	90.229.043.133	97.52
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	14.001.091.235	13.920.531.258	99.42
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	9.141.091.235	9.130.950.994	99.89
Fasilitasi Bantuan Hukum	3.070.000.000	3.046.835.409	99.25
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.790.000.000	1.742.744.855	97.36
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.800.000.000	1.736.978.497	96.50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi Keuangan (Rp)	% Capaian
	1	2	3	4
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		700.000.000	661.628.725	94.52
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		500.000.000	495.488.556	99.10
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		600.000.000	579.861.216	96.64
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		12.144.200.000	11.327.125.018	93.27
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		2.000.000.000	1.628.360.223	81.42
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		670.000.000	472.369.959	70.50
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		670.000.000	554.247.533	82.72
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		660.000.000	601.742.731	91.17
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		3.813.000.000	3.724.765.071	97.69
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		820.121.320	800.156.441	97.57
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1.301.601.000	1.269.375.923	97.52
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1.691.277.680	1.655.232.707	97.87
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4.000.000.000	3.713.226.719	92.83
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		245.000.000	241.232.695	98.46
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		435.000.000	324.824.373	74.67
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		3.320.000.000	3.147.169.651	94.79
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		2.331.200.000	2.260.773.005	96.98
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		590.845.000	571.476.027	96.72

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		% Capaian
		3	4	
1	2	3	4	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	527.382.400	495.126.336		93.88
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1.212.972.600	1.194.170.642		98.45

Sumber : Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan (Bappeda) Tahun 2025

Uraian penjelasan table 3.8:

Berdasarkan table 3.8 Tentang Capaian Anggaran Program dan Kegiatan yang ada di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, untuk anggaran perubahan sebesar Rp. 597,149,212,391.00, dan pada akhir kegiatan terealisasi sebesar Rp. 568,507,001,310.00 dengan prosentase capaian sebesar 95,20%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Sekretariat Daerah tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah memiliki 3 sasaran strategis dengan status secara keseluruhan tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Penghambat	Tindak Lanjut
1	Perencanaan kegiatan belum tersentral pada bagian Perencanaan	Penyusunan draf SOP Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan di Lingkungan Setkab Kutim
2	Prosedural pra penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)	Digitalisasi dokumen administrasi perangkat daerah
4	ASN belum sepenuhnya menjalankan SOTK dan aturan kedisiplinan pegawai	Pemberian reward kepada pegawai
5	Data base sarana dan prasarana/ fasilitas tidak sesuai dengan realita yang ada, kurang tertibnya pelaporan pada barang yang berpindah tempat/ lokasi, rusak maupun hilang	Pembenahan data base BMD, pada sistem pencatatan BMD dengan melakukan inventarisasi BMD pada sistem aplikasi yang telah disediakan

6	Perubahan regulasi RB	1. Road map RB tematik
		2. Penyusunan dan penerapan peta proses bisnis
7	Kurang tenaga perancang peraturan perundang-undangan	1. Pemetaan anjab dan melakukan koordinasi bersama BKPSDM untuk perekrutan tenaga perancang undang-undang
		2. Peningkatan SDM
		3. Penerapan SOP
8	- Tenaga operasional yang belum memadai - Kurang pahamnya para PIHAK dalam pelaksanaan mekanisme kerja sama sesuai dengan peraturan pemerintah pusat	1. Peningkatan SDM pembuat MoU dan PKS 2. Melakukan sosialisasi dan mekanisme terkait kerjasama daerah 3. Menyusun dan menerapkam SOP
9	Minimnya koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD	Koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk penyusunan LPPD

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Sangatta, 22 Desember 2025
Sekretariat Daerah



RIZALI HADI

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Sekretariat Daerah selama 5 tahun